

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangguran merupakan suatu topik yang tidak pernah hilang dalam sejarah ekonomi dan selalu menarik untuk dibicarakan. Pengangguran adalah istilah bagi orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pengangguran umumnya kebanyakan terdapat di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Berbeda dengan yang dialami oleh negara maju. Masalah pengangguran di negara-negara maju lebih mudah terselesaikan dari pada di negara-negara berkembang, karena hanya berkaitan dengan pasang surutnya perputaran bisnis dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi, masalah ledakan penduduk ataupun masalah sosial politik di negara tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat, tentu tidak luput dari masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila

pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2007).

Jika kita berbicara masalah pengangguran berarti kita berbicara masalah ketenagakerjaan. Berbagai permasalahan dibidang ketenagakerjaan harus terus menjadi perhatian dari semua pihak terkait baik pemerintah, pengusaha, pekerja itu sendiri dan pihak lainnya agar permasalahan tersebut dapat cepat diantisipasi dan diselesaikan. Permasalahan tersebut diantaranya tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka serta rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Oleh sebab itu permasalahan pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja, (BPS Sumut, 2013).

Untuk mengatasi masalah pengangguran berbagai teori dan riset telah berkembang, namun persoalan pengangguran masih menjadi sesuatu yang sulit dipecahkan, hingga saat ini belum ada teori yang benar-benar menyeluruh untuk mengungkap penyebab dari pengangguran ini, dan juga belum ada yang mampu untuk menyusun rumus yang benar-benar tepat untuk menanggulangnya.

Banyak faktor yang menjadi penyebab pengangguran antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan angkatan kerja, upah dan kondisi perekonomian.

Pada masa tingkat inflasi yang tinggi perekonomian akan mengalami kelesuan. Harga barang akan mengalami kenaikan yang otomatis penjualan juga

akan menurun sehingga perusahaan kadang-kadang harus memberhentikan sebagian karyawannya dalam rangka menekan biaya produksi.

Faktor kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Setiap negara tentunya menginginkan perekonomiannya mengalami pertumbuhan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun dalam mencapai pertumbuhan yang tinggi tentunya terdapat hambatan-hambatan seperti keterbatasan dana, kurangnya kualitas input tenaga kerja berupa keterampilan, pengetahuan, dan disiplin angkatan kerja, serta teknologi yang tertinggal.

Faktor ketiga adalah angkatan kerja. Di Indonesia jumlah kelompok ini jumlahnya sangat besar sebagai akibat dari pertumbuhan yang sangat tinggi dan angkatan kerja itu sendiri masih sangat memerlukan pendidikan dan latihan agar mampu menjadi tenaga kerja yang terampil dan produktif sesuai tuntutan dunia kerja.

Faktor keempat adalah upah. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw, 2000:133-134). Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Kaufman dan Hotchkiss,1999). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan pemerintah maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya *output* yang harus dikeluarkan oleh suatu

perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Kemudian faktor kelima kondisi perekonomian. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kondisi perekonomian adalah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sejak terjadinya krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 tentu sangat mempengaruhi situasi perekonomian di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Salah dampak dari kondisi tersebut adalah semakin banyaknya jumlah pengangguran sebagai akibat banyaknya perusahaan yang tutup sehingga dengan terpaksa juga perusahaan harus memberhentikan karyawannya.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa masalah pengangguran tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan semakin kompleks. Hal ini terlihat semakin bertambah penduduk usia kerja setiap tahunnya sebagai akibat dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda sehingga dengan sendirinya akan menambah angka pengangguran terutama pengangguran terbuka.

Permasalahan pengangguran di provinsi Sumatera Utara tidak jauh berbeda dengan masalah pengangguran secara nasional, yakni masih tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu, pengangguran menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah sebagai proses penopang perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, harus segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya penanggulangan pengangguran.

Berikut ini disajikan tabel data pengangguran di Indonesia dua tahun terakhir yakni tahun 2012 dan 2013:

Tabel 1.1
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi Tahun 2012-2013

Provinsi	2012		2013	
	Februari		Februari	
	Jumlah (ribu orang)	TPT (persen)	Jumlah (ribu orang)	TPT (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Aceh	164,4	7,88	177,8	8,38
2. Sumatera Utara	413,6	6,31	387,9	6,01
3. Sumatera Barat	147,0	6,25	151,3	6,33
4. Riau	135,6	5,17	116,4	4,13
5. Kepulauan Riau	52,3	5,87	60,7	6,39
6. Jambi	56,6	3,65	45,9	2,90
7. Sumatera Selatan	219,8	5,59	214,4	5,49
8. Kepulauan Bangka Belitung	17,1	2,78	21,9	3,30
9. Bengkulu	19,6	2,14	19,5	2,12
10. Lampung	201,3	5,12	197,7	5,09
11. DKI Jakarta	566,5	10,72	513,2	9,94
12. Jawa Barat	1.969,0	9,78	1.815,3	8,90
13. Banten	579,7	10,74	552,9	10,10
14. Jawa Tengah	1.006,5	5,88	941,4	5,57
15. DI Yogyakarta	78,8	4,09	72,5	3,80
16. Jawa Timur	819,5	4,13	804,4	4,00
17. Bali	48,6	2,11	45,4	1,89
18. Nusa Tenggara Barat	113,6	5,21	120,0	5,37
19. Nusa Tenggara Timur	54,1	2,39	46,4	2,01
20. Kalimantan Barat	75,8	3,36	68,6	3,09
21. Kalimantan Tengah	31,4	2,71	21,1	1,82
22. Kalimantan Selatan	81,5	4,32	75,8	3,91
23. Kalimantan Timur	170,1	9,29	167,6	8,87
24. Sulawesi Utara	92,7	8,32	78,3	7,19
25. Gorontalo	22,6	4,81	20,7	4,31
26. Sulawesi Tengah	50,5	3,73	35,1	2,65
27. Sulawesi Selatan	235,2	6,46	211,1	5,83
28. Sulawesi Barat	11,6	2,07	11,5	2,00
29. Sulawesi Tenggara	33,9	3,10	36,8	3,47
30. Maluku	48,7	7,11	48,1	6,73
31. Maluku Utara	25,0	5,31	26,6	5,51
32. Papua	46,2	2,90	47,7	2,81
33. Papua Barat	25,2	6,57	16,8	4,47
Indonesia	7.614,2	6,32	7.170,5	5,92

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut di atas terlihat bahwa provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-10 baik untuk tahun 2012 (6,31%) maupun tahun 2013 (6,01%), bahkan pada tahun 2013 tingkat pengangguran di Sumatera Utara melampaui tingkat pengangguran nasional yang hanya 5,92%.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di provinsi Sumatera Utara berikut ini disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan Seminggu yang lalu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, 2011 dan 2012

Keterangan	2010		2011		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja:	6.617.377	69,51	6.314.239	72,09	6.131.664	69,41
- Bekerja	6.125.571	64,34	5.912.114	67,50	5.751.682	65,11
- Pengangguran	491.806	5,17	402.125	4,59	379.982	4,30
Bukan Angkatan Kerja	2.902.897	30,49	2.445.082	27,91	2.702.653	30,59
Jumlah	9.520.274	100	8.759.321	100	8.834.317	100
T P A K (%)	69,51		72,09		69,41	
TPT (%)	7,43		6,37		6,20	

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

(Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus 2012)

Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah tertentu. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun ke atas Menurut
Kabupaten/Kota dan Kegiatan serta TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
dan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Penduduk 15+	TPT (%)	TPAK
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Nias	72.920	112	73.032	8.623	81.655	0,15	89,44
2. Mandailing Natal	193.361	13.262	206.623	61.507	268.130	6,42	77,06
3. Tap. Selatan	150.856	3.735	154.591	21.365	175.956	2,42	87,86
4. Tap. Tengah	147.517	8.183	155.700	42.384	198.084	5,26	78,60
5. Tapanuli Utara	154.087	3.583	157.670	25.716	183.386	2,27	85,98
6. Toba Samosir	91.591	1.852	93.443	21.271	114.714	1,98	81,46
7. Labuhan Batu	152.479	12.897	165.376	112.672	278.048	7,80	59,48
8. Asahan	267.117	21.096	288.213	169.841	458.054	7,32	62,92
9. Simalungun	384.807	22.022	406.829	164.353	571.182	5,41	71,23
10. Dairi	157.533	2.291	159.824	15.224	175.048	1,43	91,30
11. Karo	205.243	4.185	209.428	34.773	244.201	2,00	85,76
12. Deli Serdang	744.133	54.709	798.842	418.716	1.217.558	6,85	65,61
13. Langkat	425.892	27.103	452.995	227.292	680.287	5,98	66,59
14. Nias Selatan	147.306	705	148.011	36.934	184.945	0,48	80,03
15. Humbang Hasundutan	98.815	347	99.162	9.002	108.164	0,35	91,68
16. Pakpak Barat	22.285	254	22.539	3.267	25.806	1,13	87,34
17. Samosir	69.326	922	70.248	8.294	78.542	1,31	89,44
18. Serdang Bedagai	259.149	15.605	274.754	138.852	413.606	5,68	66,43
19. Batubara	150.574	10.937	161.511	93.979	255.490	6,77	63,22
20. Padang Lawas Utara	94.770	6.688	101.458	41.807	143.265	6,59	70,82
21. Padang Lawas	83.623	6.753	90.376	54.024	144.400	7,47	62,59
22. Labuhan Batu Selatan	109.059	10.201	119.260	65.155	184.415	8,55	64,67
23. Labuhan Batu Utara	137.182	10.685	147.867	76.486	224.353	7,23	65,91
24. Nias Utara	56.913	2.076	58.989	20.999	79.988	3,52	73,75
25. Nias Barat	42.506	509	43.015	8.785	51.800	1,18	83,04
26. Sibolga	31.419	7.470	38.889	15.818	54.707	19,21	71,09
27. Tanjung Balai	55.457	9.598	65.055	32.472	97.527	14,75	66,70
28. Pematang Siantar	98.300	6.433	104.733	57.854	162.587	6,14	64,42
29. Tebing Tinggi	57.809	7.387	65.196	34.361	99.557	11,33	65,49
30. Medan	851.642	84.501	936.143	558.097	1.494.240	9,03	62,65
31. Binjai	97.179	10.557	107.736	63.840	171.576	9,80	62,79
32. Padang Sidempuan	85.837	8.588	94.425	34.208	128.633	9,10	73,41
33. Gunung Sitoli	54.995	4.736	59.731	24.682	84.413	7,93	70,76
Sumatera Utara	5.751.682	379.982	6.131.664	2.702.653	8.834.317	6,20	69,41

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara
(Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus 2012)

Pada tahun 2012 jumlah penduduk usia kerja di Sumatera Utara adalah 8.834.317 orang yang terdiri dari 6.131.664 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 2.702.653 orang merupakan bukan angkatan kerja.

TPAK Sumatera Utara tahun 2012 adalah sebesar 69,41 persen, artinya bahwa pada tahun 2012 sebanyak 69,41 persen penduduk usia kerja di Sumatera Utara siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja, mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan naik turun. Pada tahun 2010 TPAK Sumatera Utara 69,51 persen, kemudian meningkat menjadi 72,09 persen pada tahun 2011 dan kembali turun pada tahun 2012 menjadi 69,41 persen. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki TPAK paling tinggi, yaitu sebesar 91,68 persen dan sebaliknya kota Medan merupakan yang terendah dengan TPAK sebesar 62,65 persen.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 di Sumatera Utara sebesar 6,20 persen. Angka ini lebih kecil dibanding tahun 2011 dan 2010 yang masing-masing sebesar 6,37 persen dan 7,43 persen. Kecenderungan menurunnya tingkat pengangguran terbuka ini tentunya sinyal positif bagi kesejahteraan di Sumatera Utara.

Bertolak dari permasalahan di atas dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang lebih baik tentang pengangguran dan variabel ekonomi makro yang mempengaruhinya, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul : “**Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Pengangguran di Sumatera Utara**”.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah pengangguran adalah masalah yang bersifat multidimensional. Persoalannya adalah di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, ternyata penduduk menganggur di Sumatera Utara masih ditemukan cukup tinggi yaitu lebih dari setengah dari jumlah total kepala keluarga. Untuk menurunkan jumlah penduduk menganggur ini, maka perlu diketahui bagaimana pengangguran di Sumatera Utara terjadi dan variabel apa saja yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan angkatan kerja, tingkat upah, dan krisis ekonomi terhadap pengangguran dengan mengambil studi kasus di provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara?

3. Apakah pertumbuhan angkatan kerja berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara?
4. Apakah upah berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara?
5. Apakah krisis ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pengangguran di Sumatera Utara?
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Sumatera Utara?
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan angkatan kerja terhadap pengangguran di Sumatera Utara?
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap pengangguran di Sumatera Utara?
5. Untuk menganalisis pengaruh krisis ekonomi terhadap pengangguran di Sumatera Utara?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, hasil penelitian menjadi sumbangan pemikiran serta untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin

mengetahui variabel ekonomi makro yang mempengaruhi pengangguran di Sumatera Utara.

2. Secara khusus, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan kalangan swasta di Sumatera Utara dalam mengambil kebijakan.
3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam masalah yang sama.